



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar belakang	2
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	5
Tabel 2.1	8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah	32
Tabel 3.1	33
BAB IV. PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan adanya acuan tersebut, Perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Natuna Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 2);
- n. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
- o. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 203 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah
- Tabel 3.1 BAB

IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian realisasi keuangan pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 3.121.270.929,00 dari total anggaran yaitu sebesar Rp. 6.104.116.416,00 atau 51,14%. Terdiri atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 3.078.603.364,00 atau 51,66% dan UPTD BLK sebesar Rp. 42.676.565,00 atau 29,51%.

Adapun capaian kinerja Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai Semester II Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI LAPORAN LKJIP	81.90	71.05	86,75
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	86,75	86,75
I.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100
II.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persentase	85	100	117,64
II.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu	1	1	100
II.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	32	96,96
II.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase	59.30	37,50	63,23
II.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100
II.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100
II.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100
II.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0
II.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	0	0
II.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	7	35

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
II.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase	60	0	0
II.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0
II.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	100	30,77	30,77
II.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6	50
II.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	100
II.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	100
II.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	59.40	0,61	1,02
II.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	6	54,54
II.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	0	0
II.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	0	0
III.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	0.16	1,08	675
III.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persentase	77	35,14	45,64
III.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16	16	0
IV.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang diTempatkan	Persentase	94	2,50	2,66
IV.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	7	2	28,58
IV.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	0	0

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
V.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persetanse	4	29,63	740.75
V.1.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persentase	60	0	0
V.1.1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	0	0
V.1.2.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3.250	218	6,70
VI.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	Persentase	100	100	100
VI.1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	1	100
VI.1.1	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	0	0
VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persentase	100	100	100
VII.1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	SKP	2	2	100
VII.1.1.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	SP	6	3	50
UPTD BALAI LATIHAN KERJA						
VIII.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persentase	85	40	47,06
VIII.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	57	111,11	194,92
VIII.1.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0
VIII.1.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0
VIII.1.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0
VIII.1.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	10	200
VIII.2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	100	25	25
VIII.2.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6	50
VIII.2.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	50

Capaian kinerja pada Triwulan II secara keseluruhan cukup baik yang ditandai dengan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan sudah tercapai 100 % dan sisanya masih tahap pelaksanaan, walaupun demikian Pengguna Anggaran terus melakukan pemantauan progress pelaksanaan kegiatan terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap capaian program/kegiatan/sub kegiatan secara berkala pertriwulannya agar pelaksanaan kegiatan terlaksana secara maksimal.

Adapun capaian realisasi Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai Semester II Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			6.104.116.416	3.163.956.494	51,83
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			5.959.494.976	3.121.279.929	52,37
I	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI LAPORAN LKJIP	31.881.288	3.401.035	10,67
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	31.881.288	3.401.035	10,67
I.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	31.881.288	3.401.035	10,67
II.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persentase	.363.838.268	2.979.799.278	55,55
II.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu	4.130.302.636	2.646.681.681	64,08
II.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	4.130.302.636	2.646.681.681	64,08
II.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase	380.567.250	84.909.684	22,31
II.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	37.441.990	11.195.000	29,90
II.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	29.791.300	6.392.100	-
II.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2.671.000	0	-
II.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	31.333.000	0	-
II.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7.000.000	0	-
II.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	272.329.960	67.322.584	24,72
II.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase	78.305.000	3.446.075	4,40
II.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	78.305.000	3.446.075	4,40

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
II.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	449.192.100	222.336.838	49,50
II.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	45.392.900	15.181.500	33,44
II.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	94.999.200	28.724.149	30,24
II.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	308.800.000	178.431.189	57,78
II.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	325.471.282	22.425.000	6,89
II.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100.421.282	19.985.000	19,90
II.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25.050.000	2.440.000	9,74
II.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	200.000.000	0	-
III.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	271.129.700	66.325.749	24,46
III.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persentase	271.129.700	66.325.749	24,46
III.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	271.129.700	66.325.749	24,46
IV.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang diTempatkan	Persentase	92.645.720	3.914.100	4,22
IV.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	92.645.720	3.914.100	4,22
IV.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	92.645.720	3.914.100	4,22
V.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persetanse	129.000.000	7.727.494	5,99
V.1.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persentase	129.000.000	7.727.494	5,99
V.1.1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	92.045.000	5.907.494	6,42
V.1.2.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	36.955.000	1.820.000	4,92

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
VI.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	Persentase	41.000.000	4.022.168	9,81
VI.1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	Kawasan	41.000.000	4.022.168	9,81
VI.1.1	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	41.000.000	4.022.168	9,81
VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persentase	30.000.000	13.413.540	44,71
VII.1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	SKP	30.000.000	13.413.540	44,71
VII.1.1.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	SP	30.000.000	13.413.540	44,71
UPTD BALAI LATIHAN KERJA				144.621.440	42.676.565	29,51
VIII.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persentase	144.621.440	42.676.565	29,51
VIII.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	93.471.440	16.425.530	17,57
VIII.1.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16.714.800	4.113.530	24,61
VIII.1.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	457.800	-	0,00
VIII.1.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.590.000	-	0,00
VIII.1.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70.708.840	12.312.000	17,41
VIII.2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	51.150.000	26.251.035	51,32
VIII.2.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6.150.000	2.251.035	36,60
VIII.2.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	45.000.000	24.000.000	53,33

Dari capaian relaisasi diatas sudah tercapai cukup baik namun masih ada beberapa rogram/kegiatan/sub kegiatan yang capaiannya masih belum optimal disebabkan masih dalam proses pelaksanaan dan akan direalisasikan pada triwulan III dan IV mendatang.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 6 (Enam) program yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 4.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.9 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.1
 - 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
 - 1.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
 - 1.2 Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - 1.5 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
4. Program Hubungan Industrial
 1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 1. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - 1.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - 1.1 Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

Sementara itu UPTD BLK (Balai Latihan Kerja) terdiri atas 1(satu) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 1.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1
3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran **Tabel 3.1** sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pada Renja perubahan Tahun 2024 terdapat **penambahan** anggaran sebesar Rp. 1.012.950.936, dimana anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.932.764.256 dan sesudah perubahan menjadi Rp. 6.945.715.192, penambahan anggaran ini terjadi dikarenakan untuk menutupi kekurangan gaji dan tunjangan ASN beserta tenaga harian lepas dan digunakan untuk peningkatan operasional kantor.

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/Berkurang
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7-6)
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				5,932,764,256.00	6,945,715,192.00	1,012,950,936.00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.652.764.256,00	6.874.316.172,00	1,221,551,916.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.652.764.256,00	6.874.316.172,00	1,221,551,916.00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	81,90 Nilai	81,90 Nilai	4.517.084.256,00	6.381.939.772,00	1,864,855,516.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	56.000.000,00	31.881.288,00	- 24,118,712.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	56.000.000,00	32.192.080,00	- 23,807,920.00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 Tepat Waktu	3.449.217.128,00	4.130.302.636,00	681,085,508.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.449.217.128,00	4.906.032.852,00	1,456,815,724.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	95 Persen	70.000.000,00	0,00	- 70,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0.00 Paket	0.00 Paket	55.000.000,00	0,00	- 55,000,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	0,00	- 15,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-	59 Persen	175.867.128,00	380.567.250,00	204,700,122.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	31.479.000,00	25,479,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	37.733.300,00	17,733,300.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.736.400,00	736,400.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	- 6,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.867.128,00	32.395.340,00	- 7,471,788.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	5.000.000,00	7.000.000,00	2,000,000.00
	Penyediaan Bahan/Material						
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	- 3,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	89.000.000,00	305.044.600,00	216,044,600.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	- 5,000,000.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-	60 Persen	40.000.000,00	78.305.000,00	38,305,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	211.000.000,00	171,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-	100 Persen	441.000.000,00	449.192.100,00	8,192,100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	37.295.000,00	32,295,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	61.000.000,00	98.629.200,00	37,629,200.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	375.000.000,00	347.900.000,00	- 27,100,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-	59.4 Persen	285.000.000,00	325.471.282,00	40,471,282.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	15.000.000,00	102.412.000,00	87,412,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	30.090.000,00	5,090,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	220.000.000,00	200.000.000,00	- 20,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	- 25,000,000.00
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	-	0,16 Persen	456.680.000,00	270.644.450,00	- 186,035,550.00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	-	77 Persen	456.680.000,00	271.129.700,00	- 185,550,300.00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	16 Orang	256.680.000,00	270.644.450,00	13,964,450.00
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						

		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	- 200,000,000.00
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	-	94 Persen	364.000.000,00	93.130.970,00	- 270,869,030.00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	-	7 Lowongan Kerja	231.000.000,00	92.645.720,00	- 138,354,280.00
	Pelayanan antar Kerja						
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	10 Orang	10 Orang	81.000.000,00	0,00	- 81,000,000.00
	Perluasan Kesempatan Kerja						
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	93.130.970,00	- 56,869,030.00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	-	133.000.000,00	0,00	- 133,000,000.00
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	- 60,000,000.00
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1 Orang	1 Orang	73.000.000,00	0,00	- 73,000,000.00

4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	-	4 Persen	315.000.000,00	128.600.980,00	- 186,399,020.00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	-	60 Persen	315.000.000,00	129.000.000,00	- 186,000,000.00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	1 Perkara	185.000.000,00	91.645.980,00	- 93,354,020.00
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3250 Orang	3250 Orang	130.000.000,00	36.955.000,00	- 93,045,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				280.000.000,00	71.399.020,00	- 208,600,980.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				280.000.000,00	71.399.020,00	- 208,600,980.00
5	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN	-	100 Persen	175.000.000,00	41.230.420,00	- 133,769,580.00
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	-	1 Kawasan	175.000.000,00	41.000.000,00	- 134,000,000.00

	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						
		Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	41.230.420,00	- 133,769,580.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIKEMBANGKAN	-	100 Persen	105.000.000,00	30.168.600,00	- 74,831,400.00
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	-	2 SKP	105.000.000,00	30.000.000,00	- 75,000,000.00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	6 Satuan Permukiman	105.000.000,00	30.168.600,00	- 74,831,400.00
	UPTD Balai Latihan Kerja				84.600.000,00	158.751.440,00	74,151,440.00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.600.000,00	158.751.440,00	74,151,440.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				84.600.000,00	158.751.440,00	74,151,440.00
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	84.600.000,00	158.751.440,00	74,151,440.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	13.000.000,00	93.471.440,00	80,471,440.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	21.746.400,00	21,746,400.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						

		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	457.800,00	457,800.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	4.425.000,00	4,425,000.00
	Penyediaan Bahan/Material						
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	0,00	69.622.240,00	69,622,240.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.000.000,00	0,00	- 6,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	65.600.000,00	51.150.000,00	- 14,450,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.000.000,00	7,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	55.500.000,00	55,500,000.00
	J U M L A H				5.932.764.256,00	6.945.715.192,00	1,012,950,936.00

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024.

Ranai, 02 Agustus 2024

**KEPALA DINAS**

INDRA JONI, S.Sos
NIP. 19700903 199201 1 001

